

## **BAB 1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Di era globalisasi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menawarkan berbagai manfaat seperti efisiensi, kecepatan dalam penyebaran informasi, keterjangkauan, dan transparansi, termasuk dalam sektor pemerintahan. Terlebih lagi di masa otonomi daerah seperti sekarang, penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, atau yang dikenal sebagai *E-Government* (Rusdy & Flambonita, 2023). Menurut *World Bank*, *E-Government* merupakan sebuah penggunaan atau pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh lembaga pemerintahan dengan tujuan meningkatkan pelayanan pada masyarakat, pelaku bisnis, dan sekaligus memfasilitasi kerja sama dengan lembaga pemerintah lainnya baik dalam kecepatan proses perizinan, administrasi, maupun sosialisasi kebijakan-kebijakan pemerintah. Regulasi tentang informasi publik diatur pada Undang - Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Peraturan tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) memberikan jaminan kepastian, khususnya bagi masyarakat untuk dapat mengakses informasi yang ada di Badan publik. Sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat 1 dan 2, bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan dan Badan Publik wajib menyediakan informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Hal ini menunjukkan tidak ada lagi celah bagi badan publik untuk tidak atau bahkan menghalang-halangi masyarakat untuk mengetahui semua informasi yang tersedia (Peraturan RI, 2008).

Dalam upaya mengoptimalkan tata kelola keuangan dan administrasi daerah. pada tahun 2019 Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) merupakan aplikasi terpadu yang digunakan sebagai alat bantu bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas

pelaksanaan berbagai regulasi dalam pengelolaan keuangan daerah (Kemendagri, 2019). Kebijakan ini bertujuan untuk menyediakan fasilitas dan mendorong terciptanya sistem data serta informasi pembangunan, informasi keuangan, dan informasi pemerintahan lainnya guna mendukung pengambilan keputusan, baik di tingkat daerah maupun pusat. Sistem ini juga diharapkan mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerah melalui kolaborasi berbasis teknologi, sehingga dapat membangun data *base* yang terintegrasi di daerah (Nasution & Nurwani, 2021).

Dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2023 menerbitkan SIPD versi baru yaitu Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD RI). Tujuan penerbitan SIPD RI yang dilakukan oleh Kemendagri adalah untuk memperbaiki berbagai kelemahan yang terdapat pada SIPD versi sebelumnya, seperti keterbatasan dalam integritas data antar sektor, sering terjadinya kendala teknis, serta kurang optimalnya proses perencanaan dan pelaporan. Aplikasi SIPD RI di desain dengan menggunakan sistem *microservice* dan memiliki modul yang terpisah seperti modul perencanaan, modul penatausahaan, modul akuntansi, dan modul pelaporan yang memungkinkan semua pemerintah daerah bisa mengaksesnya secara bersamaan tanpa masalah.

Meskipun SIPD RI dirancang untuk mempermudah pekerjaan pemerintah daerah, namun faktanya masih banyak instansi yang menghadapi berbagai kendala dalam penerapannya. Beberapa pemerintah daerah masih menghadapi kesulitan dalam proses penginputan data, keterbatasan infrastruktur teknologi, serta rendahnya kompetensi sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem baru. Penelitian yang dilakukan oleh Triwahyuni & Fatmawati (2024) menunjukkan bahwa meskipun SIPD RI dirancang untuk mempercepat proses pelaporan serta memudahkan akses terhadap data keuangan, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala yang cukup signifikan. Kendala tersebut antara lain keterbatasan infrastruktur teknologi yang belum memadai, rendahnya kompetensi sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem, serta adanya gangguan teknis yang memengaruhi aksesibilitas sejumlah fitur penting dalam SIPD RI. Selain itu penelitian Sari (2024) menunjukkan bahwa penerapan SIPD RI masih dianggap

kurang efektif. Beberapa masalah yang ditemukan seperti eror pada sistem, jaringan server yang sering macet atau lambat, serta proses login yang harus diulang, yang semuanya menjadi kendala dalam pengoperasian aplikasi ini.

Penetapan kebijakan baru oleh Kemendagri mewajibkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diharuskan menerapkan aplikasi SIPD RI termasuk Kantor Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi. Dari hasil observasi awal peneliti dari lokasi riset menunjukkan penerapan SIPD RI masih dianggap kurang efektif. Salah satu masalah yang dirasakan oleh pengguna SIPD RI di Kantor Kecamatan Srono adalah sistem yang masih sering eror hal ini tentunya menjadi penghambat proses penggunaan aplikasi tersebut. Dari permasalahan tersebut, perlu dilakukan analisis terhadap sistem *e-government* melalui SIPD RI agar dapat menghasilkan informasi dan temuan yang dapat dijadikan bahan referensi dalam upaya meningkatkan efektivitas dan optimalisasi layanan tersebut. Model CSE-UCLA dianggap sebagai pendekatan yang paling tepat dan sesuai untuk penelitian ini.

Evaluasi merupakan proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi guna menilai sejauh mana suatu program, kegiatan, atau kebijakan telah mencapai kekuatan, kelemahan, efektivitas, dan efisiensi dari suatu proses atau hasil yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Evaluasi sistem memiliki banyak model yang dapat digunakan salah satunya adalah model CSE-UCLA (*Center for the Study of Evaluation – University of California in Los Angeles*) CSE-UCLA merupakan salah satu model atau desain yang digunakan dalam mengevaluasi suatu sistem atau program. Ciri dari model CSE-UCLA adalah adanya lima tahap yang dilakukan dalam evaluasi yaitu *system assessment, program planning, program implementation, program improvement, program certification*. Namun, dalam penelitian ini hanya memfokuskan kajian pada tiga komponen dari model CSE-UCLA yaitu *program implementation, program improvement, dan program certification*. Pemilihan ketiga komponen tersebut didasarkan pada karakteristik objek penelitian, dimana Kantor Kecamatan Srono berperan sebagai pengguna SIPD RI, bukan sebagai pihak yang merancang maupun mengembangkan sistem. Oleh karena itu, evaluasi dalam penelitian ini

lebih diarahkan pada aspek pelaksanaan sistem SIPD RI, kendala yang muncul penggunaan sistem beserta upaya perbaikannya, serta efektivitas penerapan SIPD RI dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian ini terinspirasi dari penelitian sebelumnya, dengan keterbaruan yang terletak pada inovasi penilaian penerapan SIPD RI di Kantor Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi menggunakan model evaluasi CSE-UCLA. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul “**Analisis Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) Menggunakan Model CSE-UCLA (Studi Kasus Pada Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi)**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya maka dapat dirumuskan masalah yaitu bagaimana analisis Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) ditinjau dari komponen *program implementation*, *program improvement*, dan *program certification* pada model CSE-UCLA?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) berdasarkan komponen *program implementation*, *program improvement*, dan *program certification* pada model CSE-UCLA.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan tujuan yang telah dibuat, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat :

### **1. Manfaat Bagi Peneliti**

Penelitian ini memberikan pengalaman dan pemahaman mendalam tentang implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD RI). Selain itu, penelitian ini juga memperkaya pengetahuan peneliti mengenai model CSE-UCLA serta tantangan dan peluang dalam penerapan teknologi informasi di sektor pemerintahan.

## 2. Manfaat Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi dan sumber informasi bagi pembaca yang tertarik pada topik Sistem Informasi Pemerintah, khususnya SIPD RI. Pembaca dapat memperoleh wawasan tentang praktik terbaik, kendala, dan solusi dalam implementasi SIPD RI.

## 3. Manfaat Bagi Kantor Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi

Hasil penelitian ini dapat menjadi saran dan masukan bagi Kantor Kecamatan Srono dalam penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD RI).